

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISTILAH	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	12
I.1. Latar Belakang Masalah	12
I.2. Rumusan Masalah	14
I.3. Tujuan Penelitian	14
I.4. Batasan Masalah	15
I.5. Manfaat Penelitian	15
I.5.1. Manfaat Teoritis	15
I.5.2. Manfaat Praktis	15
I.6. Kerangka Penelitian.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN	17
II.1. Kondisi Umum	17
II.2. Tinjauan Pustaka	20
II.2.1 Implementasi	20
II.2.2 Transaksi Nontunai	21
II.2.3 Belanja Pemerintah Daerah.....	22
II.2.4 Pendapatan Pemerintah Daerah.....	23
II.2.5 <i>Good Governance</i>	25
II.3. Penelitian Terdahulu.....	26
II.4. Keaslian Penelitian	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
III.1. Desain Penelitian	34
III.2. Jenis dan Sumber Data	34
III.3. Teknik Pengumpulan Data	35
III.4. Teknik Analisis Data	36

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	39
IV.1. Gambaran Umum Penerapan Sistem Pembayaran Nontunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.....	39
IV.2. Implementasi Transaksi Nontunai dalam Pelaksanaan Belanja Daerah di BPPKAD Kabupaten Tuban.....	41
IV.2.1. Perbandingan Pelaksanaan Transaksi Nontunai Berdasarkan Perbup Nomor 9 Tahun 2018 dengan Pelaksanaan di Lapangan.....	41
IV.2.2. Prosedur Pembayaran Belanja Menggunakan Mekanisme GUP (Ganti Uang Persediaan).....	49
IV.2.3. Prosedur Pembayaran Belanja Menggunakan Mekanisme LS (Langsung).....	55
IV.3. Implementasi Transaksi Nontunai dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah di BPPKAD Kabupaten Tuban.....	58
IV.4. Kendala Pelaksanaan Transaksi Nontunai di BPPKAD Kabupaten Tuban	67
IV.5. Pengaruh Implementasi Transaksi Nontunai terhadap Perwujudan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas, serta Profesionalitas di BPPKAD Tuban	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
V.1. Kesimpulan.....	86
V.2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi Sebelum dan Sesudah Implementasi Transaksi Nontunai di Indonesia	19
Tabel 2.2. Penelitian Implementasi Transaksi Nontunai di Kabupaten Tuban dan Beberapa Daerah di Indonesia	30
Tabel 4.1. Sistem Pembayaran atas Pengeluaran Belanja Daerah Berdasarkan Perbup No. 9 Tahun 2018	41
Tabel 4.2. Sistem Pembayaran atas Pengeluaran Belanja Daerah Berdasarkan Pelaksanaan di Lapangan	42
Tabel 4.3. Sistem Pembayaran Belanja Daerah Kabupaten Tuban.....	46
Tabel 4.4. Sistem Pembayaran atas Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Perbup No. 9 Tahun 2018.....	58
Tabel 4.5. Sistem Pembayaran atas Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Pelaksanaan di Lapangan	59
Tabel 4.6. Tabel Indikator.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Penelitian	16
Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Kualitatif.....	38
Gambar 4.1. Alur Pembayaran Belanja Tunai Mekanisme GU	50
Gambar 4.2. Alur Pembayaran Belanja Nontunai Mekanisme GU	50
Gambar 4.3. Alur Subproses Pengajuan GU	52
Gambar 4.4. Mekanisme Belanja Langsung	56
Gambar 4.5. Alur Penerimaan Pajak Daerah dengan Pembayaran Tunai.....	62
Gambar 4.6. Alur Penerimaan Pajak Daerah dengan Pembayaran Nontunai	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Flowchart</i> Pengajuan GU	92
Lampiran 2. <i>Flowchart</i> Mekanisme Belanja Langsung	96
Lampiran 3. Contoh SP2D	100
Lampiran 4. Contoh SPM	101
Lampiran 5. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab	104
Lampiran 6. Contoh Surat Pengantar SPP	105
Lampiran 7. Contoh Ringkasan SPP	106
Lampiran 8. Contoh Rincian SPP	107
Lampiran 9. <i>Checklist</i>	108
Lampiran 10. Contoh Kuitansi	110
Lampiran 11. Daftar Pertanyaan Wawancara Tatap Muka	111
Lampiran 12. Cuplikan Wawancara <i>Online</i> Melalui <i>Whatsapp Chat</i>	116

DAFTAR ISTILAH

<i>Accrual based</i>	: basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
ADD	: Alokasi Dana Desa
APMK	: Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
Bilyet giro	: surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima.
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPPKAD	: Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BUD	: Bendahara Umum Daerah
<i>Cashless society</i>	: kondisi ketika masyarakat bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai melainkan dengan uang elektronik atau beragam kartu (APMK – Alat Pembayaran Menggunakan Kartu)
Cek	: perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan.
DD	: Dana Desa
<i>e-billing</i>	: metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing.
<i>Internet banking</i>	: layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PA/KPA	: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PPh	: Pajak Penghasilan
PPK	: Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
SKPD	: Surat Ketetapan Pajak Daerah
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
STS	: Surat Tanda Setoran
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
Uang elektronik	: alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.